

ABSTRAK

“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.Slmn)”

Oleh :

TRIYA RAHMA SAMFITRA

E1A010017

Skripsi ini membahas mengenai pembuktian tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 67/Pid.B/2012/PN.Slmn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dan untuk mengetahui akibat hukum bagi terdakwa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif dan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pembuktiannya telah memenuhi asas batas minimum pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan telah memenuhi alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

Akibat hukum terhadap terdakwa yaitu dipidana penjara selama 1 tahun 9 bulan. Barang bukti berupa surat dikembalikan kepada Penuntut Umum dan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka putusan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Pengawas Pusat untuk mengusulkan kepada Menteri agar notaris yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai notaris.

Kata Kunci : Pembuktian, Pemalsuan Akta Otentik, Notaris.

ABSTRACT

“PROVING THE CRIME OF FALSIFICATION OF AN AUTHENTIC DEED DONE BY A NOTARY (Judicial Riview Verdict Number : 67/Pid.B/2012/PN.Slmn)”

By :

TRIYA RAHMA SAMFITRA

E1A010017

This thesis discusses about proving the crime of falsification of an authentic deed done by a notary public in Sleman District Court Decision Number 67/Pid.B/2012/Pn.Slmn. This study aims to determine proof of the crime of falsification of an authentic deed done by a notary and to determine the legal consequences for the defendants.

*The method used in this study is *juridis normative*, with specification of the study is *prescriptive* and data analysis methods used are *qualitative normative*.*

Based on the study can be concluded that the proof is in compliance with the principle of a minimum threshold of proof under Article 183 KUHAP and in compliance with the evidence set forth in Article 184 Paragraph (1) KUHAP in the form of witness statements, expert testimonies, and letters that fit together with the testimony of the defendant, as well as meet the elements in Article 264 Paragraph (1) 1st KUHP.

The Legal consequences of the defendant is sentenced to imprisonment for 1 year 9 months. The evidence such as the letter was returned to the Prosecutor and the defendant is charged pay court costs amounting to Rp. 5000. Based on Article 13 of Law Number 30 years 2004 about a notary, it can be used for Assembly Center Supervisor to suggest to the Minister that the notary dishonorably discharged as a notary.

Keywords : Proofing, Falsification Authentic Deed, Notary